

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan pendapat Mangkunegara (2009 :67) mengemukakan bahwa, Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi. Oleh karena itu, kinerja merupakan *the unlimite goals* dalam setiap organisasi publik. Visi dan misi itu sendiri mencerminkan komitmen organisasi secara teori dan diharapkan mampu diwujudkan dengan kinerja organisasi yang baik.

Instansi pemerintah daerah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementrian Koordinator / Kementrian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Privinsi, Pemko, Pemkab serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan / APBD.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Sesuai dengan pasal 120 UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk kedalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Yang termasuk ke dalam SKPD adalah Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah dan lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lain yang setingkat).

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang komprehensif dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/ dinas/ biro/ kantor) akan menghasilkan

tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja instansi tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut A. Dale Timple *dalam* Mangkunegara (2006: 15) faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sebaliknya seseorang yang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaikinya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut.

Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik karena anggaran yang disusun harus dengan pendekatan kinerja. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparan, dan akuntabel dalam menjalankan adminitrasi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan anggaran.

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk merencanakan aktivitas agar pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu, dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran terdiri atas sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang (Sujana, 2010: 35).

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah anggaran yang efektif, kepala daerah dan pimpinan SKPD membutuhkan kemampuan untuk memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak ataupun lebih dimana keputusan akan memiliki dampak dimasa depan bagi pembuat keputusan tersebut (Mulyadi, 2001: 89). Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan instansi yang terkait. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Aparat

perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang terlibat dalam proses anggaran pemerintah daerah diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat SKPD pemerintah daerah akan merasa lebih produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya.

Selain partisipasi anggaran yang juga ikut mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi diartikan sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat observasi berkurang, loyalitas karyawan dan lain-lain (Sopiah, 2008 :166).

Rasa komitmen organisasi yang kuat dalam diri seseorang akan menyebabkan seseorang berusaha keras dalam mencapai tujuan organisasi dan cenderung lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Dalam pemerintahan daerah partisipasi penyusunan anggaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, karena dengan komitmen organisasi yang tinggi akan memperbesar pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh Anggraeni (2009) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten

Labuhan Batu, sedangkan komitmen organisasi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.

Lain halnya dengan hasil penelitian dari Wulandari (2013) dimana hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Padang, penelitian ini juga menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Padang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Mutu Dian Meta Sari, Dkk dengan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rafika Anggraeni (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Dimana peneliti sebelumnya mengambil objek di SKPD Kabupaten Labuhan Batu sedangkan peneliti saat ini mengambil objek di SKPD Kabupaten Rokan hulu.

Rokan hulu adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dimana Rokan Hulu mempunyai 32 SKPD. Berdasarkan LKj IP (Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 dari alokasi anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 683.906.907.209,00 untuk mendanai 139 program utama dan 453 kegiatan utama dalam rangka untuk capaian 66 sasaran yang telah ditetapkan dalam perijinan Kinerja Tahun 2015. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 433.953.453.108,00 atau sekitar 63,45% dari alokasi dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan utama. Selanjutnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2015 hanya mencapai 46,06%. Meskipun secara keseluruhan kinerja instansi cukup baik namun pada kenyataannya kontribusi PAD tidak mencapai setengah dari yang telah ditargetkan. Dikarenakan banyaknya rencana yang tidak mencapai angka yang telah ditargetkan.

Karna itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali di kabupaten Rokan Hulu dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu?

3. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta memahami tentang pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

- b. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah daerah dan memberikan informasi bagi organisasi yang terkait (SKPD).

- c. Bagi Penelitian dimasa yang akan datang

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dan melakukan penyempurnaan penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi enam bab. Dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisikan Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisikan tentang uraian teoritis mengenai gambaran umum SKPD, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

BAB III: Bab ini berisikan Metode Penelitian, yang menggambarkan tentang lokasi penelitian, sumber dan jenis penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Bab ini membahas gambaran umum wilayah kabupaten Rokan Hulu.

BAB V: Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (SKPD).

BAB VI: Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan. disamping itu penulis juga mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai bahan bagi organisasi terkait.